

**KETERSEDIAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN TANAH PERMUKIMAN
BERDASARKAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH
DI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

HIKMAH DWI FITRIANI

NIT. 20293504

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The increase in population yearly affects the fulfillment of one of the basic human needs, namely shelter. Bungursari District is a district that in the 2020-2023 period has the highest average population growth rate in Tasikmalaya City, namely 2.34%. The increase in population is of course directly proportional to the need for housing so its availability needs to be a concern. This research aims to determine the suitability between the availability and need for land for settlements in Bungursari District, Tasikmalaya City.

The research method used is quantitative descriptive with a spatial approach. Data collection techniques were done through satellite image interpretation, observation, and interviews. Land availability was obtained based on the results of spatial analysis of the 2023 land use balance, while land requirements were obtained from the results of population projections for 2023 using geometric calculations.

The research results state that: (a) the area of land available for settlement in 2023 based on the land use balance is 4,376,158 m²; (b) the area of residential land required in 2033 is 1,624,900 m²; and (c) the average carrying capacity of residential land in 2033 in Bungursari District will be 2.72 or classified as high, so that the existing availability of residential land can still meet the need for residential land for the next 10 years.

Keywords: Balance of Land Use, Spatial, Settlement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Batasan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	11
1. Penatagunaan Tanah.....	11
2. Neraca Penatagunaan Tanah.....	12
3. Proyeksi Penduduk.....	21
4. Ketersediaan Tanah Permukiman.....	22
5. Kebutuhan Tanah Permukiman.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	26
D. Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel.....	30

D.	Definisi Operasional Konsep	31
E.	Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	32
F.	Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		39
A.	Gambaran Umum Kota Tasikmalaya	39
B.	Gambaran Umum Kecamatan Bungursari	43
BAB V KETERSEDIAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN TANAH		
	PERMUKIMAN	46
A.	Ketersediaan Tanah Permukiman	46
B.	Proyeksi Kebutuhan Tanah Permukiman	69
C.	Kesesuaian Antara Ketersediaan dengan Kebutuhan Tanah Permukiman	72
BAB VI PENUTUP		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN.....		86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan besar mengenai kependudukan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia adalah jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat. Indonesia sebagai negara yang termasuk kategori negara berkembang juga turut mengalami permasalahan tersebut. Diketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia hingga pertengahan tahun 2023 berada di angka 278,7 juta jiwa. Secara umum faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan penduduk diantaranya disebabkan karena fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), serta migrasi (Sapto Bagaskoro dkk., 2022). Pertumbuhan penduduk membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur dan layanan publik. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah adanya peningkatan kebutuhan akan tanah sebagai tempat untuk melakukan pembangunan yang bersifat fisik. Di sisi lain, tanah merupakan benda yang ketersediaannya terbatas sehingga apabila terus-menerus digunakan jumlahnya akan semakin berkurang.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berdampak pada pemenuhan salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu rumah sebagai tempat tinggal. Jumlah penduduk yang terus meningkat tentunya berdampak pada pemenuhan kebutuhan permukiman di masa depan. Kebutuhan akan tanah khususnya untuk permukiman yang semakin meningkat apabila tidak diatur dapat menyebabkan terjadinya perubahan fungsi tanah yang kemudian akan berdampak pada kelangsungan ekosistem.

Dinamika pembangunan yang cukup cepat mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi akan adanya perubahan yang berjalan serta dampak yang akan ditimbulkannya (Yusuf, 2017). Terjadinya perkembangan wilayah akan diikuti oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, serta sarana dan fasilitas pendukung. Hal tersebut jelas akan berkontribusi terhadap upaya kegiatan penataan ruang, khususnya dalam aspek perencanaan

ruang sebagai upaya mengantisipasi bentuk kecenderungan perkembangan tersebut.

Untuk mewujudkan penggunaan tanah yang seimbang dan optimal sebagai upaya pembangunan berkelanjutan, diperlukan integrasi antara penggunaan tanah dengan kebijakan penataan ruang (Sutaryono dan Dewi, 2020). Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria telah mengamanatkan bahwa pemerintah perlu membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur peruntukan tanah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah dalam upaya mewujudkan keseimbangan serta keserasian pembangunan wilayah. Kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah secara garis besar meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, serta Pengendalian Ruang (Muryono dkk., 2018). Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan salah satunya dengan mengembangkan penatagunaan tanah sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penatagunaan tanah memiliki tujuan untuk mengatur serta mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Data pertanahan merupakan data yang krusial dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Salah satu sumber utama data pertanahan adalah Neraca Penatagunaan Tanah.

Neraca Penatagunaan Tanah merupakan keseimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (Sutaryono, 2016). Neraca Penatagunaan Tanah terdiri atas perubahan penggunaan tanah, kesesuaian perubahan penggunaan tanah dengan RTRW, serta ketersediaan tanah. Penyusunan neraca penatagunaan tanah ini diamanatkan dalam Undang-undang- Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 33 dan Pasal 23

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Salah satu *output* dari Neraca Penatagunaan Tanah adalah Peta Ketersediaan Tanah. Peta ini merupakan hasil dari analisis ketersediaan tanah dengan mempertimbangkan penggunaan serta penguasaan tanah. Tanah-tanah yang belum digunakan dan belum dikuasai diklasifikasikan sebagai tanah yang tersedia dan sesuai dengan tata ruang. Disamping itu, tanah yang sudah digunakan dan dikuasai dengan suatu hak atas tanah diklasifikasikan tersedia dalam upaya penyesuaian dan optimalisasi penggunaan tanah (Siahaan dkk., 2019). Dengan demikian, neraca penatagunaan tanah memiliki manfaat untuk memberikan informasi mengenai ketersediaan tanah untuk pembangunan, khususnya permukiman.

Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 183,14 km² (BPS, 2023) dengan kepadatan penduduk sebesar 3987,55 jiwa/km². Kota Tasikmalaya di tahun 2023 memiliki kurang lebih 733,47 ribu jiwa dengan besar laju pertumbuhan penduduk 1,37% (BPS, 2023). Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang menjadi pusat perdagangan dan jasa, pusat bisnis, serta pusat industri di wilayah Priangan Timur sehingga kondisi perkotaannya menjadi cukup padat. Di sisi lain, kebutuhan akan permukiman di Kota Tasikmalaya cukup juga tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat tahun 2011, *backlog* atau jumlah kekurangan rumah di Kota Tasikmalaya mencapai 40.048 unit. Salah satu wilayah di Kota Tasikmalaya dengan pertumbuhan pembangunan bersifat fisik yang cukup pesat adalah di Kecamatan Bungursari. Kecamatan Bungursari merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas kelima di Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 17,57 km². Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya 2023, saat ini jumlah penduduk di Kecamatan Bungursari mencapai 64.276 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tertinggi dalam rentang waktu tahun 2020-2023 di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 2,34%. Bertambahnya jumlah penduduk tentu saja berbanding lurus dengan kebutuhan akan permukiman sehingga ketersediaannya perlu menjadi perhatian. Selain itu

berdasarkan penelitian As'ati & Fadjarajani (2017), Kecamatan Bungursari merupakan salah satu titik yang terdapat permukiman kumuh di Kota Tasikmalaya yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam pemasangan jaringan sarana dan prasarana permukiman. Meskipun sudah pernah mendapat perhatian dari pemerintah setempat dengan dilakukannya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang memberikan arahan penataan kawasan permukiman kumuh, namun program tersebut kurang memberikan hasil yang maksimal karena kondisi sosial budaya masyarakat yang semakin berkembang (Fadjarajani, 2015).

Untuk mewujudkan terciptanya pembangunan kawasan permukiman yang memadai, diperlukan sarana permukiman yang menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan umum yang memadai (Mustika, 2017). Menurut Setyorini dalam Rahmawati (2023) salah satu aspek penting yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan adalah analisis untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa depan menggunakan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah suatu upaya yang dilakukan dalam memprediksi jumlah penduduk di masa depan dilihat dari asumsi pada tahun dasar untuk melihat perubahan pada tahun tertentu di waktu yang akan datang. Proyeksi penduduk ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai banyaknya jumlah penduduk di masa depan yang tentunya sangat berpengaruh pada pembangunan, khususnya pembangunan permukiman. Proyeksi kebutuhan tanah permukiman dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi tanah permukiman di masa yang akan datang, sehingga dapat dilakukan pengaturan untuk kebutuhan penggunaan tanah selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan proyeksi penduduk dan proyeksi kebutuhan tanah permukiman untuk mendapat gambaran kondisi di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka judul penelitian yang akan peneliti lakukan adalah “Ketersediaan dan Proyeksi Kebutuhan Tanah Permukiman Berdasarkan Neraca Penatagunaan Tanah di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan tanah pada tahun 2023 dilihat dari neraca penatagunaan

tanah serta proyeksi kebutuhan tanah permukiman 10 tahun yang akan datang berdasarkan laju pertumbuhan penduduk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketersediaan tanah permukiman di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 berdasarkan neraca penatagunaan tanah?
2. Bagaimana proyeksi kebutuhan tanah permukiman di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya tahun 2033 dilihat dari laju pertumbuhan penduduk?
3. Bagaimana kesesuaian antara ketersediaan dengan kebutuhan tanah permukiman pada tahun 2033 di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketersediaan tanah permukiman di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 berdasarkan neraca penatagunaan tanah.
2. Untuk mengetahui proyeksi kebutuhan tanah permukiman di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya tahun 2033 dilihat dari laju pertumbuhan penduduk.
3. Untuk mengetahui informasi mengenai kesesuaian antara ketersediaan dengan kebutuhan tanah permukiman pada tahun 2033 di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

D. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian merupakan pembatasan ruang lingkup penelitian untuk memfokuskan penelitian pada aspek tertentu yang akan diteliti. Batasan masalah membantu peneliti memastikan bahwa penelitian memiliki ruang lingkup yang terdefinisi dengan jelas. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proyeksi kebutuhan tanah permukiman dilakukan untuk sampai tahun 2033 berdasarkan ketersediaan tanah permukiman pada tahun 2023
2. Peta penggunaan tanah tahun 2016 dan 2023 dibuat berdasarkan hasil interpretasi citra, sedangkan untuk peta penggunaan tanah tahun 2023 dibuat berdasarkan interpretasi citra dan observasi langsung di lapangan.
3. Batas wilayah penelitian mengikuti batas yang tercantum pada Rencana Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036.
4. Apabila terdapat ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan peruntukannya, penelitian ini tidak membahas faktor-faktor penyebabnya.
5. Pada penelitian ini analisis ketersediaan berdasarkan neraca penatagunaan tanah hanya fokus pada tanah permukiman saja.
6. Proyeksi jumlah penduduk dihitung dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk setiap tahun sama.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah/akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan ilmu pengetahuan terkait analisis spasial yaitu bagaimana cara mengetahui ketersediaan tanah permukiman menggunakan neraca penatagunaan tanah serta proyeksi ketersediaan tanah permukiman dilihat dari laju pertumbuhan penduduk. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi atau sumber bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan pembelajaran baru bagi Taruna/i Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis ketersediaan tanah berdasarkan neraca penatagunaan penduduk serta proyeksi kebutuhan tanah dilihat dari laju pertumbuhan penduduk.

2. Manfaat sosial

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penyediaan tanah khususnya permukiman kepada masyarakat. Selain itu

penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan perubahan fungsi tanah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Manfaat praktis

a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional & Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Hasil penelitian berupa data ketersediaan tanah permukiman diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai instrumen kontrol pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi bahan masukan dalam upaya perumusan kebijakan mengenai tata ruang.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini dihasilkan Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Rencana Detail Tata Ruang yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian perizinan usaha.

c. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi di bidang pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sehingga memperoleh gelar sarjana terapan di bidang pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman baru bagi penulis mengenai bagaimana membuat suatu karya ilmiah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi ketersediaan tanah di Kecamatan Bungursari dibagi menjadi dua, yaitu tidak tersedia dan tersedia. Luas tanah yang tersedia di Kecamatan Bungursari pada tahun 2023 adalah sebesar 5.600.856 m² atau 32% dari total luas wilayah. Sebaliknya, luas tanah yang tidak tersedia mencapai 11.850.092 m² atau 68% dari total luas wilayah Kecamatan Bungursari. Untuk luas ketersediaan tanah yang dapat digunakan sebagai permukiman adalah sebesar 4.376.158 m².
2. Proyeksi kebutuhan tanah permukiman di Kecamatan Bungursari pada tahun 2033 diperkirakan mencapai 1.624.900 m², berdasarkan perhitungan standar luas kaveling rumah dan jumlah penduduk. Dari hasil perhitungan daya dukung lahan permukiman pada tahun 2023, diketahui rata-rata daya dukung tanah permukiman di Kecamatan Bungursari adalah 2,72. Kelurahan Sukalaksana memiliki daya dukung tanah permukiman tertinggi dengan angka 6,69, sementara Kelurahan Sukamulya memiliki daya dukung terendah dengan angka 0,83.
3. Secara keseluruhan daya dukung tanah permukiman di Kecamatan Bungursari diklasifikasikan sebagai tinggi, karena rata-rata angka daya dukung melebihi angka 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tanah untuk permukiman masih mencukupi kebutuhan tanah permukiman pada tahun 2033.

B. Rekomendasi

1. Instansi terkait yang berwenang mengatur tentang tata ruang maupun perizinan penggunaan tanah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan tata ruang atau perumusan kebijakan.

2. Pemerintah setempat sebaiknya mulai memperhatikan kondisi ketersediaan tanah seiring bertambahnya jumlah penduduk agar penggunaan tanah yang ada dapat digunakan secara optimal.
3. Pihak yang berwenang perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan tanah sehingga dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah terhadap Rencana Detail Tata Ruang.
4. Pada permohonan perizinan pembangunan permukiman, hendaknya pihak yang berwenang mengarahkan ke wilayah yang ketersediaannya masih cukup luas, tentunya dengan tetap mempertimbangkan RDTR.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K.N. dan Sari, M.E. (2021) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Diedit oleh N. Saputra. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Adnan, A., Firyadi dan Ardiwijaya, V.S. (2020) *Penelitian Pengendalian Pertanahan dan Tata Ruang: “Upaya Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Sawah.”*
- Alam, B.P. dan Dwiputri, M. (2024) “Kebutuhan Dan Ketersediaan Lahan Tempat Tinggal Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk di Kecamatan Sukmajaya , Kota Depok,” 4, hal. 7216–7224.
- Alvaranty, J., Widyastomo, D. dan Rumbiak, R.M. (2022) “Studi Kelayakan Sarana Prasarana dan Kebutuhan Lahan Perumahan di Kawasan Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami,” 1(1), hal. 1–10.
- Anindita, F.A., Firmansyah dan Syarifudin, D. (2022) “Potensi Ketersediaan Lahan dan Sebarannya Bagi Kebutuhan Permukiman,” 8(Februari), hal. 134–144.
- Arba, H.M. (2022) *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. 3 ed. Diedit oleh M. Sari. Jakarta: Sinar Grafika. Tersedia pada: <https://books.google.co.id/books?id=m9xQswEACAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- As’ari, R. dan Fadjarajani, S. (2017) “Penataan Pemukiman Kumuh Berbasis,” *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2017*, 3, hal. 468–482.
- At-Toyibi, M.N.H. dan Kusuma, S.D. (2020) “Dasar Pemikiran Arsitektur Humanistik: Pemahaman dan Tokohnya dari Era ke Era,” *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 17(1), hal. 49–53. Tersedia pada: <https://doi.org/10.23917/sinektika.v17i1.10863>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (2022) *Penggunaan Tanah Kota Tasikmalaya Tahun 2022*. Tasikmalaya. Tersedia

pada: <https://bappelitbangda.tasikmalayakota.go.id/> (Diakses: 24 April 2024).

Badan Pusat Statistik (2023) Kecamatan Dalam Angka. Tasikmalaya. Tersedia pada:

<https://tasikmalayakota.bps.go.id/publication/download.html?nrbfveve=YzQxNmFIMjk4NzNjOGM2MGNkMDc0ODA4&xzmn=aHR0cHM6Ly90YXNpa21hbGF5YWtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjMvMDkvMjYvYzQxNmFIMjk4NzNjOGM2MGNkMDc0ODA4L2tly2FtYXRhbi1idW5ndXJzYXJpLWRhbGFtLWFnZWZ2thLTlWmJMuaHRtbA%3D%3D&twoadfnarfeauf=MjAyNC0wNi0xNCAsMT00Mjo1Mg%3D%3D> (Diakses: 24 April 2024).

Badan Pusat Statistik (2024) Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan di Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dalam Angka. Tasikmalaya. Tersedia pada:

<https://tasikmalayakota.bps.go.id/publication/2024/02/28/765a0efa622e8c366113bb86/kota-tasikmalaya-dalam-angka-2024.html> (Diakses: 24 April 2024).

Creswell, J.W. (2010) "Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed," Yogyakarta: pustaka pelajar [Preprint].

Darmawan, A. dan Sudeng p Harianto, Trio Santoso, S.D.W. (2018) "Buku Ajar Penginderaan Jauh untuk Kehutanan," hal. 1–177. Tersedia pada: <http://repository.lppm.unila.ac.id/7346/>.

Darwin, M., Mamondol, M.R., Sormin, S.A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I.M.D.M., Prasetiyo, B., Vianitati, P., dkk. (2021) Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif. Diedit oleh T.S. Tambunan. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya (2023) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Tasikmalaya. Tersedia pada: <https://opendata.tasikmalayakota.go.id/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-kecamatan-di-kota-tasikmalaya> (Diakses: 24 April 2024).

- Dinda, R., Mariati, H. dan Fitriawan, D. (2022) “Analisis Proyeksi Penduduk Dan Alokasi Kebutuhan Lahan Permukiman Di Kota Padang 2020-2030,” *Jurnal Azimut*, 4(1), hal. 19. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31317/jaz.v4i1.790>.
- Fadjarajani, S. (2015) “penataan kawasan pemukiman perkotaan.pdf.” Tasikmalaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Fairuzahira, S., Rukmi, W.I. dan Sari, K.E. (2020) “Elemen Pembentuk Permukiman Tradisional Kampung Naga,” *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 12(0341), hal. 29–38.
- Fuad, A. dan Nugroho, K.S. (2014) *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Indah, P., Mokodompit, S., Kindangen, J.I. dan Tarore, R.C. (2019) “Perubahan Lahan Pertanian Basah di Kota Kotamobagu,” *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 6(3), hal. 792–799.
- Istiqomah, N. (2019) *Dampak Relokasi Permukiman Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Rumah Susun Jatinegara Barat*.
- Jailani, M.S. (2023) “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” 1, hal. 1–9.
- Kafil, M. (2019) “Penerapan Metode K-Nearest Neighbors untuk Prediksi Penjualan Berbasis Web Pada Boutiq Dealove Bondowoso,” 3(2), hal. 59–66.
- Karyana, Y. dan Rusliana, N. (2021) “Proyeksi Penduduk Jawa Barat Tahun 2025 – 2035 Menggunakan Metode Campuran dengan Data Dasar Sensus Penduduk 2020,” *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), hal. 26–35. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2824>.
- Koeswahyono, I. (2012) *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Cetakan I. Diedit oleh Soimin. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Latue, P.C. dan Rakuasa, H. (2023) “Analisis Spasial Daya Dukung Lahan

- Permukiman di Kota Ternate,” *Bone Joint J*, 105(2), hal. 148–157.
- Lestari, N.A., Ridwan, I. dan Mangkurat, U.L. (2021) “Identifikasi Penggunaan Lahan Menggunakan Metode Klasifikasi Maksimum Likelihood Pada Citra Satelit Landsat 8 OLI / TIRS Di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Selatan Tengah,” 1(1), hal. 29–34.
- Meliani, D. (2009) “Daya dukung lingkungan kecamatan Rasau Jaya berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan lahan,” *Jurnal Mahasiswa Teknik Lingkungan Untan*, 1997, hal. 1–10.
- Muchsin dan Koeswahyono, I. (2008) *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muryono, S., Bimasena, A.N. dan Dewi, A.R. (2018) “Optimalisasi pemanfaatan neraca penatagunaan tanah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), hal. 224–248. Tersedia pada: <http://dx.doi.org/10.31292/jb.v4i2.280>.
- Mustika, D. (2017) “Di Perumahan Citraland City Samarinda,” *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 6 No. 2, hal. 1–8.
- Nugroho, A.S. dan Haritanto, W. (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan Statistika*. Cetakan I. Diedit oleh M. Kika. Yogyakarta: ANDI.
- Nurfatimah, N. (2023) “Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar,” *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 4(2), hal. 23. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26623/ijsp.v4i2.7460>.
- Oktiana, U.N., Waluyo dan Nugroho, A. (2020) “Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang,” 1(1), hal. 16–24.
- Rahman, B.B. dan Putro, S. (2022) “Kualitas Lingkungan Permukiman di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang,” *Geo*

Image, 11(1).

Rahmawati, N. (2023) Analisis Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman di Kawasan Perkotaan Mranggen. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ramdhan, M. (2021) Metode Penelitian. Cetakan Pe. Diedit oleh A.A. Effendy. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Ridwan, J. dan Sodik, A. (2013) Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Cetakan II. Diedit oleh M. Alwustho. Bandung: NUANSA.

Ritohardoyo (2013) Penggunaan dan Tata Guna Lahan. Penerbit Ombak.

Rotinsulu, F.A., C. Franklin, P.J. dan Sembel, A.S. (2017) “Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Permukiman di Kecamatan Kalawat,” *Spasial: Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(5), hal. 42–51. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/17299>.

Sapto Bagaskoro, D., Aditya Alamsyah, F. dan Ramadhan, S. (2022) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Demografi: Fertilitas, Mortalitas Dan Migrasi (Literature Review Perilaku Konsumen),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(3), hal. 303–312. Tersedia pada: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1042>.

Siahaan, T.S.M., Sutaryono, S. dan Utami, W. (2019) “Hubungan Ketersediaan Tanah dengan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun dalam Pembangunan Kota Baru Manado (Studi di Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara),” *Tunas Agraria*, 2(1), hal. 114–140. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.20>.

Stevani, H., Dewantoro, F., Ismail, M.R. dan Pratiwi, D. (2023) “Penilaian Kinerja Kelayakhunian Permukiman di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung,” *Jurnal SENDI*, 04(01), hal. 25–35.

Sugiyono (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi Kedu.

Diedit oleh Sutopo. Bandung: ALFABETA, CV.

- Sulistiyawati, W., Wahyudi dan Trinuryo, S. (2022) “Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa Dengan Blended Learning di Masa Pandemi Covid19,” *Kadikma*, 13(1), hal. 68–73.
- Sumantri, A.T., Hermita, N., Riyanto, R.A. dan Mulyaningsih, A. (2021) “Ketersediaan Sumberdaya Lahan Dan Aksesibilitas Dalam Upaya Mendukung Penyelenggaraan Ketahanan Pangan,” *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), hal. 98. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33512/jat.v14i1.11461>.
- Sutaryono (2016) “Neraca Penatagunaan Tanah: Instrumen Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi,” *FIT-ISI dan CGISE*, hal. 1–4. Tersedia pada: https://www.academia.edu/35898478/NERACA_PENATAGUNAAN_TANAH_Instrumen_Integrasi_Tata_Ruang_dan_Pertanahan_dalam_Penyusunan_RDTR_dan_Peraturan_Zonasi_Sutaryono.
- Sutaryono dan Dewi, A.R. (2020) “Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah untuk Percepatan Penyusunan RDTR-PZ,” *Jurnal Pertanahan*, 10(3), hal. 25–38.
- Suwargany, M.H. (2017) “Analisis Kebutuhan Ruang Permukiman dalam Pemenuhan Perumahan untuk Masyarakat di Kabupaten Banyumas,” hal. 174–182.
- Syawal, A., Madani, H.M. dan Mustari, N. (2021) “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar,” 3.
- Umamit, P.S., Warouw, F. dan Takumansang, E.D. (2018) “Analisis Ketersediaan Lahan Permukiman Di Kota Kotamobagu,” *Spasial*, 5(2), hal. 266–275.
- Umar, I., Marsoyo, A. dan Setiawan, B. (2018) “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Sekitar Danau Limboto Di Kabupaten Gorontalo,” *Tata Kota dan Daerah*, 10(2), hal. 77–90. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2018.010.02.3>.

Wahyudi, M.E., Munibah, K. dan Widiatmaka (2019) “Perubahan Penggunaan Lahan dan Kebutuhan Lahan Permukiman di Kota Bontang, Kalimantan Timur,” 21, hal. 267–284.

Yusuf, H. (2017) Strategi Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bungo. Universitas Andalas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,

Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut- 11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036

Sumber Lainnya

Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan

Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023